

WHY GOVERNMENT SUCCEEDS AND WHY IT FAILS
Penulis: Amihai Glazer & Lawrence S. Rothenberg

Andi Wijaya

Email: andiwijaya1973@gmail.com

Information

Garrett, T.A. Amihai Glazer and Lawrence S. Rothenberg, Why Government Succeeds and Why it Fails. *Public Choice* **110**, 393–396 (2002).
<https://doi.org/10.1023/A:1013074924100>

PENDAHULUAN

Buku ini secara garis besar membahas tentang prinsip-prinsip umum mengenai kebijakan yang sukses dan yang gagal. Menurut para penulis, ada dua tema yang berhubungan:

1. Suatu kebijakan akan sukses hanya jika pejabat pemerintahan betul-betul ingin agar program tersebut mencapai tujuannya. Kebijakan dianggap gagal jika tujuan politikus berbeda dari tujuan yang sebelumnya telah dinyatakan secara formal.

2. Interest groups mempengaruhi kebijakan sedemikian rupa hingga menggagalkan tujuan awal dari program tersebut. Interest groups telah terbukti berhasil mempengaruhi bahkan menggagalkan kebijakan pemerintah dalam hal inisiasi sosial (Lowi, 1979) hingga pertumbuhan ekonomi (Olson, 1982). Secara implisit, hasil analisa ini mengemukakan bahwa pemerintah dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang berguna bagi negara jika para politikus memiliki insentif yang sesuai dan jika special interest groups dilemahkan. Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengeliminasi kemiskinan, menurunkan tingkat kejahatan, meningkatkan equitas, menghasilkan public goods dan membersihkan lingkungan jika halangan-halangan yang dimaksud diatas dapat dieliminasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi halangan tersebut adalah dengan melakukan reformasi prosedural, antara lain membatasi masa kerja pejabat terpilih, membatasi kontribusi kampanye, melarang pemberian honor bagi pegawai pemerintah, menghindari terjadinya “the revolving door” dimana mantan pejabat pemerintah menjadi pelobby bagi perusahaan atau industri yang tadinya mereka atur melalui peraturan; dan perubahan struktural dengan membentuk pemerintahan yang bersatu (meletakkan control legislatif dan executive dalam satu partai politik), dan pendelegasian kekuatan kepada pemerintah lokal.

Berkaitan dengan interest group yang dimaksud dalam buku ini, dalam situasi di tanah air saat ini yang perlu menjadi titik berat pemikiran pemerintah adalah kehadiran organisasi masyarakat yang dalam melakukan kegiatannya sering menghambat jalannya kebijakan pemerintah. Ada dua contoh kebijakan pemerintah Amerika yang memiliki banyak persamaan namun dalam implementasinya mendapatkan hasil yang berbeda: emisi dari asap rokok dan emisi dari kendaraan bermotor yang memiliki kerusakan pada peralatan emisinya. Walaupun ada banyak kesamaan dalam kebijakan



ini, antara lain berkaitan dengan emisi gas berbahaya, terkait kesehatan, perilaku konsumen, dan diregulasi oleh peraturan pemerintah, namun pemerintah negara-negara bagian Amerika berhasil menurunkan tingkat merokok namun gagal dalam mempengaruhi masyarakat untuk memelihara peralatan emisi kendaraan bermotornya. Ada dua hal yang walaupun tidak dapat dikonfirmasi kepastiannya yang menjadi penyebab menurunnya tingkat emisi dari asap rokok:

- Dampak negatif (externalities) yang dihasilkan oleh suatu produk. Dampak negative dari merokok akan dirasakan oleh perokok selain daripada orang yang berada disekitarnya. Namun tidak demikian dengan emisi kendaraan bermotor. Yang merasakan dampaknya adalah pengendara dibelakangnya. Pada umumnya lebih sulit menurunkan konsumsi atas produk yang memiliki externalitas karena konsumen tidak membayar biaya yang diakibatkan oleh externalitas tersebut. Biaya perawatan sakit kanker yang dapat disebabkan oleh rokok tidak tercover oleh harga rokok.
- Kesulitan secara teknis untuk memecahkan masalah. Ada asumsi bahwa dalam hal ini lebih sulit bagi tukang bengkel untuk mendeteksi atau memperbaiki peralatan emisi suatu kendaraan bermotor, dibandingkan bagi seorang perokok untuk berhenti merokok. Namun kebijakan untuk menaikkan harga rokok dapat tidak memiliki pengaruh apapun jika perokok sudah kecanduan.

Salah satu pembahasan yang menarik dalam buku ini adalah jika pemerintah dapat mengontrol perekonomian. Alat utama yang digunakan pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah:

- kebijakan moneter, ditujukan terhadap manipulasi suku bunga atau suplai uang.
- Kebijakan fiscal, ditujukan untuk mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak.
- Menasihati (Exhortation), ditujukan untuk membujuk atau meyakinkan pelaku ekonomi untuk mengubah perilakunya.
- Kebijakan anggaran, ditujukan untuk meningkatkan dan menurunkan tingkat utang pemerintah dengan mengubah pengaturan pajak dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran.

Secara singkat, pemerintah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam jangka pendek dengan mengubah suplai uang, namun dalam jangka panjang efeknya tidak signifikan. Kebijakan moneter tidak dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Disisi lain, kebijakan fiscal menjadi tidak efektif jika proyek atau program pemerintah tidak dapat memberikan hasil yang langsung walaupun proyek yang tepat diimplementasikan.

Cakupan pembahasan dalam buku ini menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh berbagai kendala-kendala dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perusahaan dan konsumen secara rasional mengantisipasi pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan, apakah keberhasilan kebijakan akan lebih lanjut mendorong perusahaan dan individu untuk berperilaku dengan cara yang dimaksudkan, dan apakah



perilaku para pelaku tersebut dapat dipertahankan tanpa adanya intervensi yang terus dilakukan pemerintah.

Konsep-konsep yang mereka ajukan dikelompokkan ke dalam empat bidang kebijakan yakni: kebijakan ekonomi makro untuk mempromosikan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi; kebijakan redistributif/afirmatif untuk menguntungkan orang miskin dan orang tua; kebijakan produksi untuk menyediakan barang dan jasa; dan kebijakan peraturan untuk memandu perilaku perusahaan dan individu.

Buku ini adalah sebuah upaya untuk merombak dan menyusun kembali berbagai perdebatan-perdebatan tentang kebijakan publik, dalam rangka menghindari konflik konvensional baik yang "pro-pemerintah" atau yang berada pada posisi "anti-pemerintah"; dimana upaya ini sebenarnya justru dapat membantu untuk memprediksi kapan sebuah kebijakan publik itu akan berhasil.

Para pembaca yang tertarik dengan interaksi kebijakan publik antara ekonomi dan politik akan menghargai upaya untuk menggunakan teori ekonomi dalam memahami mengapa pendekatan-pendekatan kebijakan publik tertentu menjadi berhasil atau gagal. Ekonom Glazer (Universitas California-Irvine) dan ilmuwan politik Rothenberg (Universitas Rochester) mendasarkan analisis mereka pada empat kendala ekonomi yakni: kredibilitas; ekspektasi rasional; *crowding in / crowding out* (desakan kedalam dan desakan keluar; sebuah terminologi dalam ilmu makro ekonomi dimana pendesakan kedalam didefinisikan sebagai investasi yang memacu ketika pemerintah defisit, dalam hal ini pengeluaran pemerintah benar-benar meningkatkan permintaan untuk barang-barang, ketika permintaan untuk barang-barang tinggi, maka sektor swasta belanja meningkat, sedangkan pendesakan keluar adalah fenomena yang terjadi ketika Kebijakan Fiskal menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi investasi); dan beberapa keseimbangan lainnya; yang mereka anggap sangat bermanfaat dalam menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam kebijakan publik. Glazer dan Rothenberg menerapkan "kendala" analisis untuk empat bidang kebijakan publik, yaitu (1) Ekonomi makro, (2) Redistribusi, (3) Produksi, dan (4) Regulasi.

Ekonomi Makro: Dapatkah Pemerintah Mengendalikan Ekonomi ?

Pada dasarnya pengelolaan ekonomi membutuhkan tingkat koordinasi politik yang tinggi serta keterpaduan di berbagai lini.

alat utama pemerintah yang dapat digunakan untuk mengelola perekonomian:

1. Kebijakan moneter, yang diarahkan pada memanipulasi suku bunga atau penyediaan uang;
2. Kebijakan fiskal, diarahkan pada pengaturan tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak;
3. Nasihat, diarahkan untuk membujuk pelaku ekonomi untuk mengubah tingkah lakumereka; dan
4. Kebijakan anggaran, diarahkan pada menaikkan dan menurunkan tingkat hutang pemerintahan dengan mengubah campuran pajak dan pinjaman yang digunakan untuk pengeluaran keuangan pemerintah.



Dalam membahas permasalahan ini, sejauh mana politisi mengelola ekonomi sebelum kita meneliti alat-alat yang mungkin mereka gunakan? Maka untuk tujuan ini, kita akan melihat sketsa sejauh mana kondisi ekonomi yang merupakan produk dari intervensi pemerintah.

Kebijakan moneter dapat merangsang ekonomi dalam jangka pendek. Selanjutnya, kebijakan fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan atau mengurangi pengangguran, namun efek stimulatif lebih besar ketika peningkatan pengeluaran pemerintah tidak segera dapat mengurangi pengeluaran pribadi melalui *crowding/*pendesakan.

Paket stimulus fiskal kira-kira akan muncul secara konsisten dan seiring dengan teori yang menyatakan bahwa mereka harus terlihat seperti luar biasa, meskipun pada waktu rangsangan terjadi seperti benar, belum lagi pembenaran seperti menghabiskan berbagai sumber daya dalam kegiatan politik, hingga menimbulkan masalah. Anjuran mungkin penting ketika beberapa pola perilaku akan menghasilkan keseimbangan. Meskipun untuk mengukur efek agregat pada seruan perekonomian tersebut menjadi sulit.

Terakhir, ketidaklengkapan perilaku yang diseimbangkan dapat memungkinkan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan menjalankan anggaran yang berimbang. Sejak beberapa konsumen yang tidak banyak memahami persoalan, maka pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan dengan menghilangkan defisit. Sebaliknya, meskipun tidak menghancurkan, defisit anggaran dapat tetap melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dalam jangka panjang. Sebagai catatan penutup, beberapa hal yang menjadi perhatian bahwa sebagian besar kesimpulan dalam tulisan ini berasal dari peralatan konseptual penulis yang menghubungkan kendala ekonomi dengan politik. Kadang-kadang fitur seperti ini dapat menunjukkan bahwa tindakan pemerintah hanya bernilai kecil untuk bisa memiliki efek besar (misalnya, dapat dilakukan dengan upaya nasihat), kadang-kadang mereka menyiratkan bahwa perilaku pemerintah yang intuitif muncul tidak secara signifikan (misalnya, kebijakan fiskal dan hal lainnya).

Redistribusi: Sebuah Kisah Sukses?

Pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan setidaknya, melalui empat hal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah:

1. Sebuah perspektif akuntansi pada redistribusi tidak selamanya benar dan kadang menyesatkan. Hanya model perilaku yang memberikan pandangan yang benar terkait redistribusi.
2. Redistribusi lintas generasi dan kelas sosial mungkin saja dapat terjadi. Memang, dari semua bidang kebijakan yang kami survei, redistribusi tampaknya memungkinkan untuk tindakan pemerintah yang paling efektif. Rendahnya tingkat redistribusi terutama karena preferensi politik.
3. Sebagian orang bereaksi terhadap redistribusi, mereka menghasilkan tambahan sosial biaya. Kedua orang yang membayar pajak dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dapat bekerja kurang atau menyimpan kurang. Penerima



mungkin menderita dengan stigma meminta bantuan pemerintah, yang mengarah ke keseimbangan dengan redistribusi rendah.

4. kendala ekonomi yang telah menjadi fitur utama dari analisis kami adalah kredibilitas, *crowding out*/ pendesakan keluar, ekspektasi rasional, dan beberapa keseimbangan penting lainnya untuk memahami kemungkinan adanya redistribusi, biaya tambahan yang terkait dengan kebijakan tersebut, dan cara-cara lain dimana redistribusi dapat beroperasi.

Dua poin terkait dengan pemaparan di atas perlu disorot. Salah satunya adalah ketegangan terkait dengan kredibilitas, ini dimaknai dengan nilai jual. Hal yang paling menonjol adalah, semakin sulit bagi pemerintah untuk berkomitmen pada kebijakan redistributif, maka implementasi kebijakan tersebut mungkin lebih efektif. Sebuah pemerintahan yang ditujukan untuk adanya redistribusi, maka bisa sengaja menyembunyikan pengabdianya. Dengan kata lain, meskipun redistribusi mungkin dilakukan, maka akan ada *trade-off* antara mengembangkan program yang *credible* yang memiliki jangka panjang dengan program yang efektif. Titik lain adalah bahwa efek yang mungkin terjadi terkait ekspektasi rasional dan reaksi rasional yang berlangsung ketika kebijakan masa depan mungkin lemah.

Kapan Pemerintah Bisa Mengatur?

Kami telah menunjukkan bahwa peraturan bisa berhasil. Tapi terkendala terkait dengan kredibilitas, harapan, pilihan keseimbangan, dan *crowding out* membatasinya yang tujuan mungkin dicapai, mempengaruhi jenis instrumen peraturan yang akan efektif, dan menaikkan biaya kesuksesan bahkan di bawah kondisi terbaik.

Seperti yang disebutkan, bahwa kredibilitas dan interaksinya memiliki kendala pada aspek ke-ekonomian lainnya yang juga bisa muncul. Sedangkan lemahnya kredibilitas dapat merusak inisiatif regulasi, kebijakan ditetapkan sebagai kredibilitas dapat menyebabkan investasi dan mempromosikan keberhasilan peraturan. Setelah investasi tersebut dilakukan, harapan dapat direvisi, dukungan politik mungkin meningkat, pemusatan mungkin terjadi, dan keseimbangan ditarget dapat dicapai.

Faktor-faktor lain dapat memediasi proses ini dalam batas-batas, struktur pasar yang dapat juga mempengaruhi efektivitas peraturan. Meskipun kontrol politisi merupakan alat yang kuat, namun prosedur demokratis menyebabkan hambatan khususnya, ketidakmampuan untuk melakukan secara langsung dan dapat menyebabkan pemerintah saat ini mendukung kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan investasi *irreversibel*.

Mengatur perilaku pribadi, seperti yang kita didefinisikan secara luas, juga memiliki peluang dan hambatan tersendiri. Meskipun kredibilitas adalah kurang relevan untuk perusahaan, namun terjadinya pemusatan pada seleksi keseimbangan tertentu mungkin lebih penting. Orang mungkin berperilaku dengan cara yang menghiangkan tujuan kebijakan publik. Tapi ketika perilaku individu tunduk pada tekanan sosial, pemerintah mungkin mengeksploitasi secara kolektif dan membuat regulasi yang efektif.



Memproduksi Barang Dan Jasa: Mendapatkan Bauran Yang Benar

Dari beberapa pembahasan di atas, harus menjelaskan bahwa kompetensi politisi akan sering menemukan/memproduksi campuran yang tepat atas barang dan layanan sehingga mustahil bahwa jenis investasi pemerintah dan bentuk produksi yang kadang-kadang mereka gunakan adalah sesuatu yang akan mengejutkan. Disisi kesulitan tersebut, merupakan faktor yang berhubungan dengan kredibilitas, *crowding out*, dan harapan. Meskipun politisi dapat terlibat dalam suatu tindakan yang rumit untuk mengurangi efek ini, dalam mengatasi salah satu kendala sering menciptakan sesuatu yang berbeda dari konsep awal. Karena pemerintah dapat memilih investasi-investasi dan teknik produksi yang tidak efisien.

Misalnya, kekhawatiran tentang *crowding out* mungkin dapat menyebabkan komitmen pemerintah lemah dengan menghindari investasi modal yang besar atau dengan mengontrakkan. Penyedia, apakah perusahaan berbasis pasar atau publik berpikiran dermawan, yang percaya bahwa pemerintah tidak akan berkomitmen dapat terus memasok barang atau jasa yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak melakukan penyediaan produk atau jasa tersebut, pemerintah menciptakan masalah lainnya. Jika investasi swasta yang dibutuhkan, baik oleh perusahaan atau oleh pekerja, tidak akan datang, pemerintah mungkin gagal dalam upaya produksinya. Atau jika investasi swasta tidak diperlukan dan pemerintah dengan mudah dapat menghasilkan unit tambahan, pemerintah mungkin menemukan biaya spiral keluar dari kontrol karena konsumen potensial melihat aturan pada kelayakan tidak kredibel.

Jika pemerintah membalikkan kurs dan membuat investasi besar pada nya sendiri, *crowding out* bisa menjadi masalah. Selain itu, investor swasta mungkin khawatir bahwa pemerintah akan mengingkari dan tidak mengimbangi mereka karena mereka investasi, yang mungkin memerlukan berbagai peraturan kelembagaan. Dan jika pemerintah membangun terlalu banyak kapasitas untuk menangani fluktuasi permintaan yang sah seperti, pemerintah masih memproduksi melebihi batas yang telah ditetapkan. Tentu saja, jika pemerintah mengurangi sendiri investasi, itu mengindikasikan investasi pihak swasta kurang dan produksi swasta kurang.

Meskipun bukan satu-satunya penyebab masalah pemerintah dalam meningkatkan produksi atau untuk pilihan pemerintah dari beberapa pengaturan produksi atas orang lain, efek tersebut penting dan mungkin membantu menjelaskan mengapa pemerintah memproduksi barang dan jasa sering muncul sebagai sebuah hambatan yang terbatas. Tentu saja, mereka menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan produksi swasta, kendala ekonomi dalam bentuk *crowding out*, kredibilitas, dan harapan membuat produksi pemerintah secara kualitatif berbeda dan lebih bermasalah.

Kendala Ekonomi Dan Lembaga Politik

Desain kelembagaan dan efektivitas kebijakan memiliki saling keterkaitan, sering juga hadir dengan cara yang mengejutkan. Ketika kita meneliti perdebatan besar tentang struktur pemerintahan apakah kekuasaan harus bersatu atau dibagi, apakah harus terpusat atau diserahkan ke daerah, apakah harus mempromosikan perubahan



atau mengamankan stabilitas kita menemukan bahwa mengintegrasikan kendala ekonomi, terutama kredibilitas, memiliki implikasi untuk kinerja kebijakan.

Sedangkan perspektif utama buku ini adalah menggunakan analisis positif, kita dapat menarik dua kesimpulan normatif yang merupakan sisi berlawanan dari duasisi yang sama. Salah satunya adalah bahwa penilaian dari potensi efektivitas kebijakan harus menggabungkan konteks kelembagaan sesuai fungsinya. Yang lain adalah bahwa adopsi bentuk kelembagaan dan peraturan harus memperhitungkan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan. Dalam kedua kasus ini kendala ekonomi yang kita telah soroti harus membuktikan tentang pentingnya untuk analisis.

PENUTUP

Panggilan untuk *reinvention*, reformasi, atau semacam rekayasa ulang tentang kebijakan publik, seperti yang dibuat oleh Bill Clinton di awal kepresidenannya. Biasanya, para pendukung mereka seperti pergi untuk menyatakan bahwa pemerintah ibarat seperti sektor pada level swasta, dengan semua hal yang bisa dilakukan dengan fleksibilitas, kesadaran akan biaya, fleksibilitas, dan kreativitas. Ini memerlukan beberapa kecerdikan politik.

Dalam sebuah analisis menunjukkan bahwa dunia politik adalah lebih kompleks dan kualitatif dan terdapat perbedaan dengan pasar. Di luar masalah politik, yang jelas, upaya reformasi dramatis tampaknya tidak akan menyembuhkan semua lini karena sifat dari proses ekonomi yang mendasarinya. kendala ekonomi akan selalu menempatkan keterbatasan dan biaya pada apa yang dapat pemerintah selesaikan. Kegagalan untuk mengintegrasikan logika ekonomi seperti dalam sebuah analisis kebijakan akan mengaburkan apa yang pemerintah bisa dan tidak bisa dicapai.

Dengan kata lain, kebijakan publik tidak akan pernah tertulis secara besar, publik dan tindakan pribadi ditandai oleh perbedaan fundamental pada sektor ekonomi, banyak beberapa hal yang telah kita bahas dalam analisis seperti kredibilitas, *crowding*, harapan, dan beberapa keseimbangan. Sementara reorganisasi politik dan perampangan mungkin memiliki banyak manfaat, upaya untuk memecahkan masalah pemerintahan hanya dengan melapiskan logika pasar pada sistem politik akan menyebabkan konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan.

Sebaliknya, proses ekonomi yang mendasar akan sangat penting untuk sebuah analisis secara normatif dan positif harus dipertimbangkan dengan cermat dan terpadu. Kebijakan akan menjadi berfungsi dari apa yang mungkin pemerintah bisa lakukan, ini merupakan sifat dari sistem politik, dan interaksi antara keduanya. Karena apa yang pemerintah bisa lakukan adalah tidak sama dengan apa yang pasar bisa produksi, harapan dari kami dan evaluasi tentang sistem politik harus disesuaikan.

Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap individu disebut dengan negara.



Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Campuran, maupun sistem ekonomi Islam. Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan dalam menjamin stabilitas perekonomian negara nya.

Sudah banyak teori yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai asal mula kesenjangan kemakmuran antar bangsa, antara lain hipotesis geografi, kebudayaan dan kebodohan. Hipotesis geografi yang menyatakan bahwa penyebab kesenjangan adalah kondisi geografis, antara lain iklim tropis menyebabkan penduduknya malas, penguasanya zalim, dan merupakan sarang penyakit sehingga produktivitas rendah, atau mempengaruhi keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan yang dapat mendorong kemajuan. Hipotesis kebudayaan mendasarkan pada perbedaan antara budaya Eropa, yang memiliki sifat-sifat yang mendorong kemajuan, dan budaya lainnya yang tidak memiliki sifat tersebut, sedangkan hipotesis kebodohan mendasarkan pada kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara-negara tersebut.

Penulis mendefinisikan institusi ekonomi inklusif sebagai sistem yang memungkinkan adanya jaminan kepemilikan atas asset dan properti serta adanya peluang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini hanya dapat terjadi apabila terdapat kepastian hukum, pelayanan publik, dan kebebasan mengikat kontrak. Oleh karena itu institusi ekonomi tergantung kepada institusi politik, karena penegakan hukum dan penyediaan pelayanan publik merupakan tugas negara. Dan institusi politik yang dapat mendukung institusi ekonomi inklusif adalah sistem yang bersifat demokratis atau yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pemimpin atau pemerintahnya, serta mencegah



terjadinya penindasan, yang merupakan ciri dari negara yang memiliki institusi ekonomi ekstraktif

Dalam upaya berani untuk menjelaskan mengapa pemerintah berhasil (dan mengapa gagal), Amihai Glazer dan Lawrence Rothenberg meminta kita untuk menguji hubungan antara politik dan kebijakan, kali ini dengan menetapkan 'intrik politik' dari politisi dan kelompok kepentingan dengan pertanyaan: Bagaimana kondisi ekonomi suatu negara akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan publik? Lebih khusus, mereka berpendapat bahwa analisis kebijakan publik berdasarkan empat kendala ekonomi kredibilitas, ekspektasi rasional, *crowding out*, dan beberapa keseimbangan akan membantu mengungkapkan jenis masalah bahwa pemerintah kemungkinan besar mampu memecahkan, dan mengapa.

Negara yang makmur pada umumnya memiliki institusi pemerintahan yang *inclusive/terbuka*, dimana kekuasaan pemerintah tidak absolut dan tertutup. Kekuasaan tidak hanya ada di tangan raja dan pengikut setianya, tetapi tersebar cukup merata di kalangan saudagar-saudagar atau kepala-kepala daerah yang cukup kaya dan berkuasa, sehingga mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengambil kebijakan sepihak yang dapat merugikan kalangan-kalangan itu. Ini mengakibatkan adanya parlemen dimana pemerintah akan mengkonsultasikan dulu kebijakan yang akan di ambil sebelum mengeksekusinya. Kalangan parlemen yang berasal dari berbagai latar belakang bisnis dan ideologi dapat mendorong pemerintahan menjadi lebih plural sehingga mengambil kebijakan yang pro kepentingan yang lebih luas. Hal ini sangat bertolak belakang pada pemerintahan yang otoriter dimana kebijakan pemerintah cenderung hanya untuk kepentingan elit kecil yang berkuasa.

Mengapa negara gagal? Alasan yang disampaikan di buku ini adalah karena sistem pemerintahan dan institusi politik yang menjadi penentu system pemerintahan yang kemudian akan memandu perekonomian secara makro yang berlaku di negara tersebut. Contoh yang paling jelas adalah antara Korea Utara dan Korea Selatan, kedua negara ini terdiri dari ras yang sama dan di kepulauan yang sama yang hanya di pisahkan oleh dinding pembatas negara. Akan tetapi kehidupan rakyat mereka sangat jauh berbeda. Korea Selatan adalah negara industri yang makmur yang berhasil memproduksi barang elektronik populer seperti Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, dan lain-lain. Sedangkan Korea utara bahkan tidak mampu untuk menyediakan makanan yang cukup untuk rakyatnya, dan masih bergantung pada bantuan pangan dari PBB, salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi, tingkat kematian bayi tertinggi, tingkat pembunuhan terencana tertinggi, tingkat penggunaan internet dan tingkat kebebasan pers terendah.

Sebagian besar ekonom memiliki daftar di kepala mereka tentang kondisi di mana pasar bisa menjadi gagal. Kebanyakan ilmuwan politik memiliki satu set teori tentang mengapa politisi mungkin gagal untuk mewakili gagasan dari kedua penulis di sini meminta berbagai jenis pertanyaan, yang sering diabaikan yaitu 'kepentingan umum'. Di bawah kondisi apa ekonomi adalah kebijakan pemerintah cenderung untuk bekerja? Di berbagai bidang kebijakan publik, mereka menggambarkan bagaimana keberhasilan atau kegagalan kebijakan dapat diprediksi. Ini adalah buku yang sangat



bagus. Ini akan menjadi tambahan menyambut berbagai jenis kelas di mana kebijakan publik diperdebatkan dan diperiksa.

Kesimpulannya, bangsa-bangsa yang memiliki pemerintahan bersifat absolut tidak memiliki institusi politik yang dapat mengontrol perilaku para pemimpinnya, sehingga institusi ekonominya akan bersifat ekstraktif, yang mengakibatkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit, memiskinkan dan menindas rakyat, menciptakan kekerasan karena perebutan kekuasaan (dan kekayaan) dan pengurasan sumber daya (alam) suatu negara.

Memang, apabila kita melihat kembali sejarah bangsa-bangsa, hal ini terlihat sangat jelas, di Afrika misalnya, dimana hampir seluruh pemerintahnya bersifat korup dan menindas rakyat, demikian pula pada banyak negara Asia. Di negara-negara ini tingkat kepercayaan antar warga sangat rendah dan korupsi sangat tinggi. Tidak beda jauh dengan Indonesia, dimana sangat sulit menemukan orang yang dapat dipercaya atau memiliki integritas. Berdasarkan kenyataan ini, kita masih belum dapat menjawab pertanyaan mendasar: mengapa begitu banyak bangsa yang demikian sulit untuk membentuk institusi politik ekonomi yang inklusif? Apakah karena bangsa-bangsa tersebut rakyatnya memang demikian lemah, ataukah rakyatnya pada dasarnya juga memiliki sifat korup, sehingga tercermin dari para pemimpin/pemerintahnya? Mengapa sampai kini pemimpin bangsa-bangsa Afrika jauh lebih ekstraktif dari pada Asia? Apakah karena rakyat Afrika jauh lebih lemah dari Asia? Mengapa kudeta dan perang saudara lebih mudah terjadi di Afrika dari pada di Asia? Mengapa bangsa Eropa Barat dapat mencapai revolusi yang memungkinkan tahap dimilikinya institusi politik ekonomi inklusif, sedangkan banyak bangsa lain tidak, bahkan meskipun telah didorong dengan adanya tekanan internasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut untuk dicarikan jawabannya.

Buku ini adalah sebuah buku yang sangat penting, Mengapa Pemerintah Berhasil dan Mengapa Gagal melampaui teori pilihan publik standar dalam beberapa hal. *Pertama*, dan yang paling penting, hal itu merupakan kemajuan perdebatan atas kegagalan pemerintah. Kemudian, untuk mengintai sebuah kondisi apakah 'pro-pemerintah atau posisi' anti-pemerintah, ada baiknya kita menentukan kapankah kemungkinan kebijakan pemerintah untuk berhasil. *Kedua*, buku ini menunjukkan bahwa kredibilitas adalah konsep yang lebih penting daripada yang sebelumnya telah direalisasikan. Dan *ketiga*, ia menawarkan analisis baru dan mencolok dan bukti kebijakan tertentu, seperti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membuat pemerintah lebih akuntabel. Di atas semua ini, buku ini sangat mudah dibaca dan akan menyita perhatian yang signifikan terhadap berbagai disiplin ilmu terutama ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Pembaca yang tertarik dengan kebijakan publik antara ekonomi dan politik akan menghargai upaya ini menggunakan teori ekonomi untuk memahami mengapa pendekatan kebijakan tertentu berhasil atau gagal. Ekonom Glazer dan ilmuwan politik Rothenberg mendasarkan analisis mereka pada empat kendala ekonomi (kredibilitas, ekspektasi rasional, *Crowding in/ crowding out*, dan beberapa keseimbangan lainnya)



yang mereka anggap sangat bermanfaat dalam menjelaskan kegagalan keberhasilan kebijakan publik. Sebuah studi menuntut yang menawarkan wawasan yang berguna.

